



POLITIK ISLAM DI ZAMAN PRA-KEMERDEKAAN

Erla Sharfina Permata Noor¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khayi'in⁴,

¹STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

^{2,3,4} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail : erlasharfinapnoor@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com² masyitah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

This research examines the politics of Islam during the pre-independence period in Indonesia and its role in the nation's struggle. Islamic politics during that period had a significant impact on Indonesia's history of struggle. Prior to the independence in 1945, Indonesia experienced more than three centuries of colonization by the Netherlands. Islamic politics became a major force in organizing society and fighting for independence. Islamic political movements emerged as a response to the colonization and modernization efforts carried out by the Dutch colonial government. Islamic politics during the pre-independence period in Indonesia were grounded in a strong religious spirit. Islam played a central role in the lives of Indonesian society, and Islamic figures at that time viewed politics as a means to advocate for justice, freedom, and the welfare of the Muslim community. Islamic politics were also influenced by global political shifts at that time. Islamic organizations such as Sarekat Islam, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama played a crucial role in coordinating the political, social, and cultural struggles of the Muslim community in Indonesia. Islamic political parties such as the Masyumi Party also played a significant role in shaping Islamic political perspectives and influencing the national political direction of Indonesia. Additionally, it showcases the role of Islamic politics in the national awakening movement towards achieving independence.

Keywords : *Politics of Islam, Pre-independence Era, Islamic Organization*

Abstrak

Penelitian ini membahas politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam perjuangan bangsa. Politik Islam pada periode tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama lebih dari tiga abad. Politik Islam menjadi kekuatan utama dalam mengorganisir masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan politik Islam mulai muncul sebagai respons terhadap penjajahan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia didasarkan pada semangat agama yang kuat. Agama Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan tokoh-tokoh Islam pada masa itu melihat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Politik Islam juga dipengaruhi oleh pergeseran politik global pada saat itu. Organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan penting dalam mengoordinasikan perjuangan politik, sosial, dan budaya umat Islam di Indonesia. Partai politik Islam seperti Partai Masyumi juga memainkan peran penting dalam merumuskan pandangan politik Islam dan mempengaruhi arah politik nasional Indonesia.

Selain itu juga memperlihatkan peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan.

Kata Kunci : Politik Islam, Pra-Kemerdekaan, Organisasi Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Politik Islam pada masa pra kemerdekaan Indonesia merupakan fenomena yang sangat signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mengalami periode panjang penjajahan oleh Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Dalam konteks ini, politik Islam menjadi kekuatan yang kuat dalam mengorganisir masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, gerakan politik Islam mulai muncul di Indonesia sebagai respons terhadap penjajahan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang menyadari pentingnya membangun kesadaran nasional dan memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan politik yang kokoh.

Politik Islam pra kemerdekaan Indonesia juga dilandasi oleh semangat agama yang kuat. Agama Islam memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan banyak tokoh-tokoh Islam pada masa itu melihat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Selain itu, politik Islam pada masa pra kemerdekaan juga dipengaruhi oleh pergeseran politik global pada saat itu. Peran politik Islam pada masa pra kemerdekaan juga terlihat dalam pembentukan organisasi-organisasi Islam yang berperan aktif dalam gerakan kemerdekaan. Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan penting dalam mengoordinasikan perjuangan politik, sosial, dan budaya umat Islam di Indonesia. Selain itu, politik Islam juga termanifestasikan dalam partai politik Islam seperti Partai Masyumi yang menjadi salah satu kekuatan politik utama pada masa pra kemerdekaan. Partai ini memainkan peran penting dalam

merumuskan pandangan politik Islam dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan mempengaruhi arah politik nasional Indonesia.

Dalam latar belakang ini, penting untuk memahami bahwa politik Islam pra kemerdekaan Indonesia tidak homogen. Terdapat beragam aliran, pemikiran, dan strategi politik yang muncul dari kalangan Islam pada masa itu. Hal ini mencerminkan pluralitas dan kompleksitas politik Islam sebagai gerakan yang hidup dan berkembang dalam berbagai konteks sosial dan politik. Melalui penelusuran latar belakang politik Islam pada masa pra kemerdekaan, kita dapat memahami bagaimana politik Islam menjadi kekuatan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana pengaruhnya membentuk dinamika politik dan hukum di negara ini. Dalam konteks politik hukum, pemahaman terhadap politik Islam pra kemerdekaan juga dapat membantu kita dalam memahami peran agama dalam pembentukan sistem hukum dan konstitusi negara kita saat ini.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang politik Islam pra kemerdekaan Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih baik tentang peran politik Islam dalam sejarah perjuangan bangsa ini.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah dirancang untuk menggali lebih dalam politik Islam pra kemerdekaan. Rumusan masalah ini akan menjadi panduan yang mengarahkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang sejarah, tokoh-tokoh politik dan gerakan politik Islam pada masa pra kemerdekaan. Dengan demikian, rumusan masalah ini menjadi landasan yang kuat dalam menggali wawasan dan menyajikan informasi yang berharga dalam konteks politik Islam pra kemerdekaan. Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana konteks sejarah politik Islam pra kemerdekaan?
2. Siapa saja tokoh-tokoh politik Islam pra kemerdekaan?
3. Bagaimana gerakan politik Islam pra kemerdekaan?
4. Bagaimana peran politik Islam dalam kebangkitan nasional?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memahami dan akan mengkaji secara mendalam tentang konteks sejarah politik Islam pra kemerdekaan pada saat

penjajahan belanda dan pengaruhnya terhadap politik Islam, penjajahan jepang dan pengaruhnya terhadap politik Islam, kondisi sosial politik pada masa pra kemerdekaan yang mempengaruhi perkembangan politik Islam. Termasuk tokoh-tokoh politik Islam pra kemerdekaan, dan juga gerakan politik Islam pra kemerdekaan serta gerakan politik Islam pra kemerdekaan yang ada pada partai maupun organisasi masyarakat pada era tersebut serta membahas tentang peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional.

4. Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode kualitatif¹ karena pembahasan dalam penelitian ini politik Islam pra-kemerdekaan. Pengumpulan bahan penelitian ini dari buku, jurnal artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Untuk penulisan penelitian ini dengan cara:

1. Deskriptif : Menjelaskan dan menjabarkan tentang konteks sejarah politik Islam pra kemerdekaan pada saat penjajahan belanda dan pengaruhnya terhadap politik Islam, penjajahan jepang dan pengaruhnya terhadap politik Islam, kondisi sosial politik pada masa pra kemerdekaan yang mempengaruhi perkembangan politik Islam. Termasuk tokoh-tokoh politik Islam pra kemerdekaan, dan juga gerakan politik Islam pra kemerdekaan dan gerakan politik Islam pra kemerdekaan yang ada pada partai maupun organisasi masyarakat pada era tersebut serta membahas tentang peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional.
2. Historis : Mengumpulkan bahan sejarah tentang konteks sejarah politik Islam pra kemerdekaan pada saat penjajahan belanda dan pengaruhnya terhadap politik Islam, penjajahan jepang dan pengaruhnya terhadap politik Islam, kondisi sosial politik pada masa pra kemerdekaan yang mempengaruhi perkembangan politik Islam. Termasuk tokoh-tokoh politik Islam pra kemerdekaan, dan juga gerakan politik Islam pra kemerdekaan dan juga gerakan politik Islam pra kemerdekaan yang ada pada partai maupun organisasi masyarakat pada era tersebut serta membahas tentang peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional.

¹ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 6.

5. Batasan Pembahasan Penelitian

Batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas dan berfokus tentang berfokus pada pengkajian politik Islam yang berkembang di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa politik Islam telah ada sebelum kemerdekaan, seperti terlihat dari keberadaan organisasi keagamaan Islam yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang konteks sejarah politik Islam pra kemerdekaan pada saat penjajahan belanda dan pengaruhnya terhadap politik Islam, penjajahan jepang dan pengaruhnya terhadap politik Islam, kondisi sosial politik pada masa pra kemerdekaan yang mempengaruhi perkembangan politik Islam. Termasuk tokoh-tokoh politik Islam pra kemerdekaan, dan juga gerakan politik Islam pra kemerdekaan yang ada pada partai maupun organisasi masyarakat pada era tersebut serta membahas tentang peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Konteks Sejarah Politik Islam Pra Kemerdekaan

a) Penjajahan Belanda dan pengaruhnya terhadap pergerakan politik Islam.

Selama masa pra kemerdekaan, Belanda menghadapi fakta bahwa mayoritas penduduk yang mereka jajah di kepulauan Nusantara adalah beragama Islam. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai bentuk perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903), dan lain-lain, yang secara signifikan terkait dengan ajaran agama Islam. Namun, pada awalnya, Belanda tidak berani secara langsung mencampuri agama Islam karena kurangnya pengetahuan yang memadai tentang agama ini. Barulah setelah kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, Belanda akhirnya memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah Islam dan mengadopsi kebijakan yang lebih terarah terkait dengan agama ini².

Pada tahun 1820, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 22 Tahun 1820 yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk membina para penghuku di Jawa untuk melakukan tugas

² Zaprulkhan, "Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia," *JRP (Jurnal Review Politik)* 3, no. 2 (2013): 153–167.

dalam bidang perkawinan dan waris. Untuk wilayah Batavia ditetapkan Keputusan Komisaris Jenderal Nomor 17 Tahun 1828 tentang pembentukan Majelis Distrik di tiap-tiap distrik yang berwenang menyelesaikan sengketa agama, perkawinan, dan waris sepanjang tidak ada pengaturan oleh para pihak dengan akta notaris. Selain itu, telah dikeluarkan beberapa pengaturan antara lain:

- 1) *Pertama*, pada tahun 1835, dikeluarkan *Staatsblad* Nomor 58 yang menentukan wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura, yaitu menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, dan sengketa sejenis yang harus diselesaikan menurut hukum Islam.
- 2) *Kedua*, pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk pengadilan agama (*priesterraad*) melalui keputusan Ratu Belanda Nomor 24 Tahun 1882, yang mengakui sistem peradilan Islam untuk pulau Jawa dan Madura, dengan yurisdiksi mengadili perkara keluarga, waris, dan waqf untuk muslim.
- 3) *Ketiga*, pada tahun 1919, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (Indische Staatregeling/IS) Nomor 134 yang membatasi keberlakuan hukum Islam. Dalam perkara perdata yang melibatkan pihak muslim, keputusan dibuat berdasarkan hukum Islam jika hukum itu telah diadopsi dalam hukum adat dan juga tidak diatur menurut hukum adat.
- 4) *Keempat* pada tahun 1938, dibentuk Pengadilan Tinggi Islam (*Hofvoor Islamitische Zakeri*) di Jakarta. Namun pengadilan ini tidak dibiayai oleh pemerintah kolonial. Selain itu pengadilan agama kewenangannya dibatasi, yaitu tidak berwenang memutus perkara wakaf dan waris yang ditentukan menjadi wewenang pengadilan sipil.³

- b) Penjajahan Jepang dan pengaruhnya terhadap pergerakan politik Islam
- Selama masa penjajahan Belanda, perkembangan politik hukum Islam terbatas pada gerakan organisasi. Namun, melalui organisasi-organisasi tersebut, terjadi gerakan pembaharuan di Indonesia yang berkontribusi pada pergerakan kemerdekaan. Tidak dapat disangkal

³ Leli Salman Al-Farisi, "Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler," *ASPIRASI* 11, no. 2 (2021): 20–35.

bahwa posisi strategis Islam sebagai agama mayoritas di masyarakat Indonesia sangat penting. Islam terbukti mampu membangkitkan semangat revolusi untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 mengubah situasi secara drastis. Jepang berusaha keras untuk memobilisasi dan memberi semangat kepada para pemuda guna mendukung upaya perang mereka. Sukarno dan Hatta, yang kemudian dihormati sebagai simbol perjuangan nasional, dipulangkan dari pengasingan dan diberi tugas di dalam organisasi massa yang memperluas pengaruh mereka.

Jepang melihat umat Islam sebagai mitra dan menggunakan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Mereka berusaha untuk merangkul umat Islam dan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, selama masa penjajahan Jepang, perkembangan Hukum Islam dapat berjalan dengan baik karena umat Islam tidak menghadapi tekanan yang signifikan. Pada masa Jepang dibentuk federasi muslim yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masjumi pada 22 November 1943, yang dipimpin secara kolektif oleh unsur organisasi Islam yang sudah ada, terutama NU dan Muhammadiyah. Jepang juga mengizinkan dibentuknya paramiliter muslim, Hizbullah, yang mendapatkan pendidikan militer dari tentara Jepang, dengan alasan untuk membantu perlawanan tentara Jepang menghadapi sekutu

Keuntungan bagi bangsa Indonesia saat Jepang menjadikan umat Islam sebagai mitra terbukti ketika Jepang kalah dalam pertempuran dengan sekutu pada tanggal 7 September 1944. Setelah itu, bangsa Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan janji yang diberikan oleh Jepang. Pentingnya janji tersebut ditunjukkan oleh pendirian Dokuritsu Zjunbi Tjaosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945, yang bertugas merumuskan dasar negara. Dalam menjalankan tugasnya, dibentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan orang, yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan anggota BPUPKI sejumlah 62 orang.

Sebuah kelompok yang terdiri dari sembilan orang merumuskan apa yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter* pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi landasan falsafah negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi yang mencerminkan hubungan antara Islam dan negara.

Polemik mengenai hubungan agama dan negara dalam perumusan konstitusi negara dapat ditemukan dalam rapat BPUPKI dan PPKI, yang merupakan badan yang dibentuk untuk menyatakan kemerdekaan negara. Dalam debat ini, pada awalnya kelompok Islam mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, sementara kelompok nasionalis mendukung gagasan negara sekuler. Sukarno berpendapat bahwa negara dan agama harus dipisahkan, bahwa agama bukanlah urusan negara. Di sisi lain, Natsir berpendapat bahwa agama harus dianggap setara dengan negara, bahwa negara harus menjaga agama dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Fase ini dapat dianggap sebagai periode "perang ideologi" antara tokoh-tokoh yang menganut ideologi sekuler dan ideologi Islam. Pertarungan yang sengit ini semakin memanas dengan penghilangan tujuh kata dalam anak kalimat pada sila pertama Pancasila, yang akhirnya secara substansial diabaikan dalam konstitusi dengan semua konsekuensinya. Awalnya, sila pertama Pancasila berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya". Namun, kemudian diubah menjadi hanya: "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada akhirnya, prinsip-prinsip keIslaman dapat dimasukkan ke dalam Falsafah Negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadi titik awal dari penerapan ajaran Islam dalam legislasi peraturan-peraturan di Indonesia⁴.

⁴ Darmono Budi Utomo dan Ahmadi Hasan, "Politik Hukum Islam Di Indonesia Era Pra Kemerdekaan Dan Era Orde Lama," *Jentera Hukum Borneo* 6, no. 2 (2023): 13–24.

- c) Kondisi sosial politik pada masa pra kemerdekaan yang mempengaruhi perkembangan politik Islam.

Pemerintah Kolonial Belanda sangat khawatir terhadap kelompok Muslim fanatik yang memiliki hubungan dengan dunia internasional, termasuk potensi permintaan bantuan kepada negara-negara Islam di luar negeri. Rezim Belanda di Indonesia sangat takut terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Pan Islamisme. Mereka melihat Islam sebagai agama yang terorganisir dengan baik, dan dalam banyak hal dianggap serupa dengan agama Katolik Roma yang memiliki hierarki kepausan yang berhubungan dengan Sultan Turki. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda melihat Islam sebagai musuh yang menakutkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi pergerakan umat Islam di Indonesia. Khususnya dalam hal pelaksanaan ibadah haji ke Makkah, pemerintah kolonial Belanda menganggapnya sebagai pemicu ketegangan dan pemberontakan di Indonesia⁵.

Belanda telah menjajah Indonesia selama berabad-abad sebelum kemerdekaannya pada tahun 1945. Selama masa kolonialisme, Belanda menerapkan kebijakan politik dan ekonomi yang membatasi peran dan pengaruh politik Islam. Pemerintah kolonial Belanda cenderung mendukung kelompok-kelompok non-Islam yang lebih pro-Belanda. Hal ini membuat gerakan politik Islam menjadi terbatas dalam pengaruhnya.

Dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, mereka menyadari bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik yang signifikan yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam itu sendiri tidak langsung menyatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, sebagian besar perlawanan yang terjadi berpusat di sekitar komunitas Muslim. Meskipun kepercayaan orang Islam di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh animisme, Hindu, dan Buddha, mereka tetap menganggap agama mereka sebagai alat pengikat yang kuat yang membedakan mereka dari orang lain. Secara faktual, Islam di Indonesia berfungsi sebagai pusat identitas yang melambungkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seorang Belanda yang simpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia, seperti Dr. Douwes

⁵ Anggit Rizkianto, *Jalan Dakwah Sarekat Islam* (Bojonegoro: Zhena Ardh Grumma, 2020), h. 27.

Dekker, pernah mengatakan: "Jika tidak ada semangat Islam di Indonesia, maka semangat nasional yang sejati akan lenyap dari tanah air Indonesia."

Hingga akhir abad ke-19, Belanda telah mengalami banyak pengalaman pahit dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia. Sejak kedatangannya pada akhir abad ke-16, Belanda selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa Islam merupakan hambatan bagi ambisinya. Hal ini tidak mengherankan, mengingat sebagian besar penduduk di wilayah-wilayah yang mereka jajah di kepulauan Indonesia menganut agama Islam, dan motif perlawanan terhadap kolonialisme Belanda sering kali terkait dengan ajaran agama ini. Sejarah membuktikan bahwa selama abad ke-19 saja, pemerintah kolonial Belanda sibuk menghadapi berbagai pemberontakan yang kebanyakan dilakukan atas nama Islam sebagai "perang sabil". Beberapa pemberontakan terkenal pada abad tersebut termasuk Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, dan Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1871 hingga 1912. Pemberontakan-pemberontakan tersebut menimbulkan ancaman serius dan mengancam kelangsungan penjajahan Belanda di Indonesia, dan Belanda mengalami kerugian yang tidak sedikit akibatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Belanda, yang ingin mempertahankan kekuasaannya, berusaha dengan segala upaya untuk menaklukkan dan melemahkan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat mengancam penjajahannya di negara tersebut⁶.

2. Tokoh-Tokoh Politik Islam Pra Kemerdekaan

a. KH.Hasyim Asy'ari

K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai seorang tokoh yang mewakili umat Islam, memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan melawan kolonial Belanda dan Jepang. Kontribusinya yang berharga dalam perjuangan melawan penjajah, serta dalam pengembangan organisasi dan pendidikan Islam, menjadi alasan menarik untuk mengkaji latar belakang kehidupannya. K.H. Hasyim Asy'ari, yang memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim, lahir di

⁶ Effendi, "Politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8, no. 1 (2017): 91–112.

desa Gedang Jombang pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 H atau 14 Februari 1871, dan meninggal dunia di Jombang pada bulan Juli 1947⁷.

K.H. Hasyim Asy'ari telah membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme Indonesia tidak harus saling bertentangan. Keduanya dapat digabungkan dalam satu konsep perjuangan. Islam merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, sementara ke-Indonesiaan adalah realitas sosial yang harus diisi dengan nilai-nilai Islam tanpa menafikannya. Nilai-nilai Islam harus menjadi bagian dari budaya dan keanekaragaman yang sudah tertanam kuat dalam identitas dan memori kolektif bangsa Indonesia. Islam datang ke Nusantara melalui para pendakwah yang toleran dan damai. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) harus memainkan peran penting dalam melindungi keanekaragaman dan membangun solidaritas kebangsaan yang kuat.

K.H. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai seorang ulama karismatik dan guru pejuang dalam sejarah. Kepemimpinannya yang berpotensi memainkan peran besar dalam memajukan masyarakat dan membangkitkan semangat perjuangan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Dunia sosial-politik dan perjuangan merupakan bagian penting dalam kehidupannya. Pendirian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menghimpun para ulama untuk menyatukan visi dan misi perjuangan menjadi salah satu kontribusinya yang signifikan. Selain itu, melalui pesantren, K.H. Hasyim Asy'ari berhasil mencetak kader-kader pejuang yang berperan dalam perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari penjajah Belanda⁸.

b. KH Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan, seorang pribumi asli yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1868, memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah putra keempat dari K.H. Abu Bakar, seorang ulama terkemuka dan khatib di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta pada masa itu. Ia berasal dari keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu tokoh terkemuka di antara Walisongo yang merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa⁹.

⁷ Muhammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat, *KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad (dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945)* (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2018), h.41.

⁸ Fadli dan Hidayat, h. 55.

⁹ Abdul Mu'thi dkk., *KH. Ahmad Dahlan (1868-1923)* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), h. 22.

Kyai Haji Ahmad Dahlan memainkan peran yang signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa, terutama pada masa kebangkitan nasional. Upaya gigih Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam melakukan reformasi berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap gagasan-gagasan baru yang diausungnya. Meskipun pada awalnya ada penolakan, secara perlahan mereka mulai menerima dan mengikuti ide-ide tersebut¹⁰.

KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memiliki pemahaman yang kuat bahwa pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan masyarakat. Perjuangan yang dijalani oleh Ahmad Dahlan tidaklah mudah. Ia menghadapi tantangan bukan hanya dari pemerintah Belanda, tetapi juga dari sesama penduduk pribumi dan bahkan dari kalangan umat Islam sendiri. Ide-ide perubahan yang diusung oleh Ahmad Dahlan dianggap aneh dan menyimpang dari ajaran Islam, sehingga ia dituduh sebagai kiai yang kafir. Namun, ia tetap bertahan dan terus berjuang dengan segala daya dan upayanya, sehingga Muhammadiyah dapat bertahan hingga saat ini, meskipun telah berusia lebih dari satu abad. Hal ini menunjukkan tidak hanya kekuatan ideologi dan semangat yang dibangun oleh Ahmad Dahlan, tetapi juga kekuatan sistem organisasi yang ia dirikan.

c. KH Agus Salim

KH. KH Agus Salim, selain menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam Nahdlatul Ulama (NU), juga memiliki peran yang signifikan dalam sejarah politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang penganjur persatuan dan kesatuan bangsa, yang berjuang untuk menjaga harmoni antara berbagai kelompok agama dan budaya di Indonesia.

Dalam pandangan politiknya, KH Agus Salim memegang prinsip-prinsip moderat. Ia percaya bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memperkuat negara. Salim berusaha mengatasi perbedaan dan mempromosikan dialog antara umat Islam dan kelompok agama lainnya, dengan tujuan membangun toleransi, saling pengertian, dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu, KH Agus Salim adalah seorang pendukung kuat demokrasi. Ia melihat demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan

¹⁰ Mu'thi dkk., h. 175.

keputusan politik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salim meyakini bahwa demokrasi adalah landasan yang penting untuk menciptakan keadilan sosial dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks kebebasan beragama, KH Agus Salim merupakan pendukung teguh hak setiap individu untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Ia menganggap kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, dan ia berjuang untuk melindungi hak tersebut.

KH Agus Salim juga terlibat secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai diplomat dan negarawan, ia berperan dalam perundingan diplomatik dan memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun hubungan luar negeri yang kuat telah memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia.

d. H.O.S. Tjokroaminoto

Raden Mas Haji Oemar Said Tjokroaminoto, atau yang lebih dikenal sebagai H.O.S. Tjokroaminoto, adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang memiliki dampak signifikan dalam perjuangan untuk kesejahteraan sosial dan juga berperan penting dalam dinamika politik Indonesia. Kontribusinya meliputi pembentukan pemikiran politik dan pengaruhnya terhadap tindakan politik banyak tokoh pergerakan nasional. Raden Oemar Said Tjokroaminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo. Keturunan darah kyai dan priyayi mengalir dalam dirinya, yang menggabungkan kebijaksanaan bangsawan dan kebangsawanan secara bersamaan. Pengaruh dari kedua unsur ini sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya di masa mendatang. Kakeknya, RM. Adipati Tjokronegoro, adalah seorang Bupati di Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan ayahnya, Raden Mas Tjokromiseno, menjabat sebagai Wedana Distrik Kleco, Madiun. Tjokroaminoto mendapatkan pendidikan formal dengan sistem pendidikan Barat. Hal ini memungkinkannya untuk menguasai bahasa Belanda dan bahasa Inggris.

Tjokroaminoto adalah tokoh yang terlibat dalam pembentukan Sarekat Islam, sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 11 November 1911 sebagai hasil modifikasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang sebelumnya ada. Dibawah kepemimpinan Tjokroaminoto, SDI kemudian diubah namanya

menjadi Sarekat Islam (SI) pada tanggal 10 September 1912. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan umat Islam dalam memperkuat agama Islam dan meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Tjokroaminoto dikenal sebagai sosok yang karismatik dalam memimpin SI¹¹.

3. Gerakan Politik Islam Pra Kemerdekaan

Perkembangan partai politik Islam dari masa ke masa mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Organisasi dan elemen Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya perkumpulan para pemimpin Islam menjelang masa kemerdekaan yang bertujuan utama untuk memikirkan bagaimana Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Meskipun jika dilihat dari perspektif positif, elemen Islam memiliki pengaruh yang kuat karena munculnya organisasi dan pemimpin yang berlandaskan pada Islam, namun dalam sejarah yang penuh tantangan, elemen Islam menghadapi berbagai rintangan dalam membangun dasar-dasar untuk membentuk negara Indonesia, baik dalam perjuangan menuju kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan tercapai.

a. Partai Sarekat Indonesia Pra Kemerdekaan

Sarekat Islam (SI) merupakan partai politik Islam atau organisasi yang pertama kali didirikan di Indonesia. Peran SI sangat signifikan dalam perkembangan politik di Indonesia pada masa itu. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki arah gerak yang fleksibel, terutama dalam bidang perdagangan. SI didirikan pada tahun 1905 oleh sekelompok intelektual Muslim yang prihatin dengan kondisi sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia yang tertindas. Salah satu tujuan utama SI adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim melalui usaha perdagangan. SI mendirikan koperasi-koperasi dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat Muslim dalam konteks perdagangan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa SI tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi semata. Organisasi ini juga memiliki peran politik yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. SI berusaha mengorganisir dan memobilisasi massa

¹¹ Abdul Syukur dkk., "Haji Oemar Said Tjokroaminoto: Biografi, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 177–190.

Muslim untuk melawan penindasan kolonial, memperjuangkan hak-hak politik, dan mengadvokasi kepentingan politik umat Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, SI juga mengalami perkembangan dan perubahan. Dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial, SI mengadaptasi arah gerakannya untuk tetap relevan dan efektif. Selain berperan sebagai partai politik, SI juga menjadi wadah bagi masyarakat Muslim untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat identitas keislaman, dan memperjuangkan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, Sarekat Islam memiliki peran yang penting dalam perkembangan politik di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek agama, tetapi juga memainkan peran ekonomi dan politik yang signifikan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Muslim dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia¹².

Setelah terjadinya kerusuhan dan perpecahan di dalam organisasi Sarekat Islam (SI) akibat masuknya tokoh-tokoh yang tidak berhaluan Islam, seperti komunis, SI mengalami kemunduran pada tahun 1918. Konflik internal ini menyebabkan perpecahan dan melemahkan kekuatan organisasi tersebut.

Namun, dalam konteks yang sama, pada tanggal 18 November 1912, muncul sebuah organisasi Islam yang dikenal dengan nama Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memperkuat dan memajukan umat Islam serta mempromosikan nilai-nilai Islam yang murni. Organisasi ini mengajarkan ajaran Islam yang moderat dan berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang dianggap merusak masyarakat Muslim.

Muhammadiyah memiliki fokus yang lebih spesifik, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas keagamaan umat Muslim.

Perkembangan Muhammadiyah di samping kemunduran Sarekat Islam mencerminkan dinamika pergerakan Islam pada masa itu. Muhammadiyah menjadi salah satu kekuatan yang kuat dalam gerakan Islam di Indonesia,

¹² Amos Sukamto, "Ketegangan antar kelompok agama pada masa orde lama sampai awal orde baru: Dari konflik perumusan ideologi negara sampai konflik fisik," *Indonesian Journal of Theology* 1, no. 1 (2013): 25-47.

dengan pengaruh yang luas di masyarakat. Organisasi ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembentukan identitas Islam di Indonesia¹³.

b. Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam gerakan politik dan sosial.

Menurut catatan sejarah, saat ini kebangkitan nasionalisme Indonesia ditandai oleh munculnya gerakan yang melawan penjajahan Belanda dengan tujuan mencapai kemerdekaan dari penjajah tersebut. Dalam perjuangan ini, agama Islam memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara ini. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda dan merupakan bagian integral dari proses perkembangan gerakan nasional menuju era kebangkitan nasional. Perkembangan organisasi massa pada periode ini dapat ditelusuri hingga tiga dekade pertama abad ke-20, yang oleh sebagian orang disebut sebagai masa awal munculnya gagasan-gagasan baru tentang organisasi dan pengenalan definisi baru dan lebih maju tentang identitas.

Strategi baru dalam perjuangan menggunakan organisasi menjadi pilihan yang sangat menguntungkan dengan banyak potensi untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan. Pada masa tersebut, bidang sosial dan pendidikan menjadi pilihan yang ideal bagi organisasi tersebut untuk mengembangkan basis massa mereka baik di daerah maupun di seluruh Nusantara. Contohnya adalah organisasi di Jawa, tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan memimpin gerakan Muhammadiyah, sementara K.H. Hasyim Asy'ari menjadi penggerak di gerakan Nahdlatul Ulama¹⁴.

Melalui berbagai organisasi sosial-keagamaan yang disebutkan di atas, kekuatan umat Islam dikumpulkan, semangat rakyat ditempa, dan generasi muda umat Islam dilatih untuk melanjutkan perjuangan dan memperkuat umat dalam mempertahankan tanah air. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi sosial-keagamaan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan dari peran ulama yang memiliki pengaruh bahkan berkontribusi dalam pembentukan perkumpulan-perkumpulan tersebut.

¹³ Miqdad Syukril Iman, "Analisis Partai Politik Islam Pra Hingga Pasca Kemerdekaan 1910-1960: Sebuah Kajian Islam Formalis," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2023): 49–65.

¹⁴ Yudi Armansyah, "Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.

1) Peran Muhammadiyah dalam Politik

Pada tahun 1912, Persyarikatan Muhammadiyah didirikan. Organisasi ini dianggap sebagai gerakan pembaruan dan didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta¹⁵. Muhammadiyah tidak didirikan sebagai organisasi politik atau partai politik, melainkan sebagai "gerakan politik" yang melibatkan upaya dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* (mendorong yang baik dan mencegah yang buruk). Konstruksi sebagai "gerakan politik" tercermin dalam langkah-langkah yang diambil oleh Kiai Dahlan pada awal pendiriannya, termasuk menjalin hubungan politik dengan berbagai pihak.

Selama periode 1912-1926, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa mereka bukan organisasi politik. Meskipun demikian, jejak-jejak politik Muhammadiyah terlihat jelas. KH. Ahmad Dahlan, misalnya, memiliki hubungan dekat dengan Budi Utomo, Sarekat Islam, KH. Misbah (Kelompok Komunis), dan kelompok Ahmadiyah. Banyak aktivis Muhammadiyah, termasuk KH. Ahmad Dahlan sendiri, aktif di organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo. Pada periode berikutnya, KH. Mas Mansur bahkan terlibat dalam pendirian Partai Islam Indonesia (PII). Pada Tanwir Muhammadiyah tahun 1938, Muhammadiyah memutuskan untuk mengizinkan KH. Mas Mansur, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah, menjadi pemimpin PII¹⁶.

Muhammadiyah didirikan sebagai tanggapan terhadap tekanan yang dilakukan oleh aktivis Kristen yang berusaha memperluas pengaruh mereka di bidang pendidikan. Konflik ini menciptakan ketegangan yang mendorong para aktivis Islam untuk membentuk organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi sosial yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pelayanan sosial di masyarakat Indonesia. Organisasi ini dikenal sebagai kekuatan pembaharuan dalam Islam di Indonesia, dengan prinsip-prinsip yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatan umat.

¹⁵ Muhammad Alifuddin, "Dakwah Muhammadiyah dalam Membangun Kesadaran Nasional di Kendari Masa Pra Kemerdekaan: Perspektif Gerakan Sosial," *Al-MUNZIR* 13, no. 2 (2023): 209–230.

¹⁶ Ma'mun Murod Al-Barbasy, "Muhammadiyah dan Politik: Dilema Antara Keep Close dan Keep Distance," *Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 2017.

Dalam aspek politik, Muhammadiyah memiliki pandangan yang bervariasi seiring dengan perkembangannya. Pada beberapa waktu, Muhammadiyah mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan dan kestabilan. Namun, pada saat lain, Muhammadiyah juga mengambil sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa Muhammadiyah pada masa itu merupakan organisasi Islam yang independen dan tidak terikat pada partai politik tertentu. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kepentingan umat dan memajukan Islam di Indonesia¹⁷.

2) Nahdlatul Ulama dalam Politik

Sejak pendiriannya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) selalu terlibat dalam politik Indonesia, baik secara aktif maupun melalui peran di belakang layar. NU telah memainkan peran yang signifikan dalam arena politik Indonesia sepanjang masa, dan keterlibatannya masih berlangsung hingga saat ini¹⁸. Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya. Organisasi keagamaan ini didirikan oleh K.H.A. Wahab Chasbullah. Kehadiran NU dapat dilihat sebagai respons terhadap perkembangan gerakan pembaruan di Indonesia. NU didirikan sebagai respons defensif terhadap aktivitas kelompok reformis dan kelompok modernis moderat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi berdirinya NU adalah dampak konflik di Timur Tengah yang memicu gerakan serupa di dunia Islam. Ketika pertama kali dibentuk, orientasi NU lebih berfokus pada masalah agama dan sosial masyarakat, dengan kegiatan yang terpusat pada pendidikan, pengajian, dan tabligh. Namun, seiring berjalannya waktu, pada dekade kedua keberadaannya, NU memperluas fokusnya untuk melibatkan isu-isu nasional¹⁹.

Berdasarkan hasil Muktamar ke-27 yang diadakan di Situbondo, Nahdlatul Ulama (NU) telah mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi partai politik dan kembali ke tujuan awalnya sesuai dengan khittah

¹⁷ Anis, "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* No 2 (2019).

¹⁸ Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, dan Dede Sri Kartini, "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 1 (2023): 41–53.

¹⁹ Utomo dan Hasan, "Politik Hukum Islam Di Indonesia Era Pra Kemerdekaan Dan Era Orde Lama."

1926. Khittah tersebut menegaskan bahwa NU berperan dalam kegiatan sosial, agama, dan pendidikan. Visi NU dalam menjalankan politik adalah memiliki pemahaman tentang bangsa dan mewujudkan persatuan bangsa untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat²⁰.

4. Gerakan Politik Islam dalam moment Kebangkitan Nasional

Pergerakan nasional atau kebangkitan nasional adalah sebuah gerakan yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dari penjajah atau pembebasan dari sistem kolonial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pergerakan nasional melibatkan berbagai bidang dalam upayanya, termasuk bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks politik, pergerakan nasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjajah menggunakan politik sebagai alat dominasi dan pengendalian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dikuasainya. Penjajah memanfaatkan struktur politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pergerakan nasional dalam bidang politik menjadi sorotan utama. Di dalamnya, terdapat upaya untuk membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Aktivis pergerakan nasional berupaya mengorganisir massa, membentuk partai politik, dan mengadakan kampanye politik yang bertujuan untuk mengubah struktur politik yang ada dan memperoleh kemandirian politik.

Partisipasi dalam politik memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi dan tuntutan mereka secara kolektif, serta mempengaruhi pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan nasib mereka. Dalam pergerakan nasional, politik menjadi arena untuk memperjuangkan hak-hak sipil, kebebasan, dan keadilan bagi masyarakat yang dikuasai oleh penjajah.

Secara keseluruhan, pergerakan nasional multidimensional, yang meliputi bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, mengakui pentingnya peran politik dalam mencapai kemerdekaan. Dalam konteks ini, pergerakan nasional dalam bidang politik menjadi fokus utama karena politik digunakan secara intensif oleh penjajah untuk mempertahankan dominasi mereka. Oleh karena itu, pergerakan

²⁰ Hawari, Suwaryo, dan Kartini, "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia."

nasional berusaha untuk memobilisasi masa, membangun kesadaran politik, dan membentuk struktur politik yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat yang mereka perjuangkan²¹.

Politik Islam memainkan peran penting dalam moment kebangkitan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa peran politik Islam dalam kebangkitan nasional:

a. Mobilisasi Massa pada Era Pra Kemerdekaan

Ormas politik Islam memiliki kekuatan dalam mobilisasi massa dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka mampu menggalang dukungan yang luas dari umat Muslim dan masyarakat secara umum, memobilisasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan nasional. Baik partai politik Islam maupun organisasi Islam lainnya sering memiliki jaringan yang kuat di tingkat lokal, yang memperkuat kemampuan mereka dalam menggerakkan rakyat. Melalui jaringan yang luas, ormas politik Islam mampu menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat dalam skala yang besar. Mereka menggunakan platform komunikasi dan media yang tersedia untuk menyebarkan ideologi dan tujuan perjuangan nasional kepada umat Muslim dan masyarakat luas. Dalam hal ini, kehadiran mereka sebagai kekuatan yang berakar pada nilai-nilai agama Islam memberikan daya tarik dan kredibilitas yang kuat bagi para penganut Islam.

Selain itu, partai politik Islam dan organisasi Islam lainnya juga sering berperan sebagai mediator dan penghubung antara pemerintah kolonial dan masyarakat. Mereka adalah suara bagi aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan umat Muslim dan masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan. Karena jaringan mereka yang kuat di tingkat lokal, mereka dapat mengumpulkan informasi tentang situasi dan kondisi masyarakat serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik bagi kesejahteraan umat Muslim dan masyarakat secara umum.

Selain itu, ormas politik Islam juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan aksi massa. Mereka dapat mengadakan demonstrasi, pemogokan, pertemuan publik, dan kegiatan lainnya untuk menyuarakan tuntutan perjuangan nasional. Melalui mobilitas massa yang

²¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Ke Budaya Museum Kebangkitan Nasional 1997 /1998, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan* (Jakarta: Musium Kebangkitan Nasional, 1997), h. 16.

mereka hasilkan, mereka dapat menciptakan tekanan politik yang signifikan terhadap pemerintah kolonial dan memperkuat perjuangan kemerdekaan. Dengan ini, ormas politik Islam memiliki peran yang kuat dalam mobilisasi massa dan berjuang untuk kemerdekaan. Dukungan yang luas dari umat Muslim dan masyarakat secara umum, serta jaringan lokal yang kuat, menjadikan mereka kekuatan yang signifikan dalam menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan.

b. Artikulasi Aspirasi

Politik Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengartikulasikan aspirasi nasional dengan menggunakan perspektif agama sebagai landasan utama. Mereka berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam membentuk visi dan tujuan nasional sebuah negara. Dalam hal ini, politik Islam berfungsi sebagai suara yang mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Muslim yang ingin mencapai kebebasan, keadilan, dan kedaulatan nasional.

Dalam konteks ini, politik Islam berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ranah politik dan menyediakan kerangka kerja yang didasarkan pada ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan individu, harus menjadi bagian integral dari pembentukan kebijakan publik dan sistem pemerintahan. Dengan demikian, politik Islam memainkan peran penting dalam merumuskan agenda politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, politik Islam dapat mengadvokasi penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Mereka juga berperan dalam memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan nasional, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Muslim dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Selain itu, politik Islam berusaha membangun kesadaran dan kepedulian umat Muslim terhadap isu-isu nasional. Mereka menggerakkan masyarakat Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, protes damai, atau kegiatan politik lainnya. Dengan memberdayakan masyarakat Muslim dan memberikan suara kepada mereka, politik Islam berupaya untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat dan negara.

c. Pemersatu Umat

Politik Islam menganggap umat Muslim sebagai komunitas yang bersatu dalam keyakinan agama dan tujuan politik. Mereka berupaya mengatasi perbedaan-perbedaan yang mungkin timbul dalam masyarakat Muslim, seperti perbedaan etnis, suku, dan golongan sosial. Politik Islam menegaskan bahwa persatuan dan solidaritas umat Muslim adalah kunci keberhasilan dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan menekankan persatuan, politik Islam menciptakan saluran komunikasi dan dialog antara umat Muslim dari berbagai latar belakang. Mereka mempromosikan nilai-nilai inklusif dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, politik Islam menjadi wadah yang mempersatukan umat Muslim dalam satu gerakan perjuangan yang lebih besar.

Politik Islam juga berperan dalam membangun kesadaran identitas nasional yang berbasis agama. Mereka mendorong umat Muslim untuk mengenali diri mereka sebagai bagian dari bangsa yang sedang berjuang untuk kemerdekaan, dengan agama Islam sebagai perekat yang kuat. Dalam proses ini, politik Islam menghilangkan batasan-batasan etnis, suku, dan golongan yang dapat memecah belah masyarakat Muslim, sehingga memperkuat kesatuan dalam pergerakan nasional. Selain itu, politik Islam juga berusaha menyatukan berbagai kelompok dan organisasi Islam dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan perjuangan nasional. Mereka bekerja sama dengan partai politik Islam, ormas Islam, dan tokoh-tokoh agama dalam mengoordinasikan upaya dan strategi perjuangan. Dengan demikian, politik Islam menjadi kekuatan yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dan pandangan dalam satu gerakan yang bersatu.

C. PENUTUP

1. Simpulan

a. Sejarah politik Islam Pra Kemerdekaan meliputi penjajahan belanda dan pengaruhnya terhadap pergerakan politik Islam yang memunculkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan agama Islam. Selain itu juga terjadi penjajahan jepang yang berpengaruh terhadap pergerakan politik Islam yang diketahui bahwa terdapat keterbatasan pergerakan organisasi. Akan tetapi dapat bergerak melalui organisasi-organisasi yang berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu juga kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangan politik Islam. Pemberontakan-pemberontakan tersebut menimbulkan ancaman serius

dan mengancam kelangsungan penjajahan Belanda di Indonesia, dan Belanda mengalami kerugian yang tidak sedikit akibatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Belanda, yang ingin mempertahankan kekuasaannya, berusaha dengan segala upaya untuk menaklukkan dan melemahkan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat mengancam penjajahannya di negara tersebut.

b. Beberapa tokoh politik Islam pra kemerdekaan yaitu K.H. Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, KH Agus Salim dan H.O.S Tjokroaminoto yang memiliki peran politik melalui organisasi-organisasi.

c. Terdapat beberapa gerakan politik yang ada di Indonesia pra kemerdekaan yaitu melalui organisasi-organisasi yaitu Sarekat Islam (SI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain itu juga ada partai yang berjaya dimasanya yaitu partai masyumi.

d. Politik Islam memiliki peran yang penting dalam kebangkitan bangsa Indonesia yaitu dalam hal melakukan mobilisasi masa pada era sebelum kemerdekaan, artikulasi aspirasi masyarakat dan juga merupakan pemersatu umat.

2. Saran

Tentunya penelitian ini jauh dari kata sempurna dan perlu penelitian lebih lanjut. Banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Akan tetapi diharapkan bisa memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai politik Islam pra kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. "Muhammadiyah dan Politik: Dilema Antara Keep Close dan Keep Distance." *Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 2017.
- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler." *ASPIRASI* 11, no. 2 (2021): 20–35.
- Alifuddin, Muhammad. "Dakwah Muhammadiyah dalam Membangun Kesadaran Nasional di Kendari Masa Pra Kemerdekaan: Perspektif Gerakan Sosial." *AL-MUNZIR* 13, no. 2 (2023): 209–230.
- Anis. "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* No 2 (2019).

- Armansyah, Yudi. "Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Ke Budaya Museum Kebangkitan Nasional 1997 /1998. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Musium Kebangkitan Nasional, 1997.
- Effendi. "Politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8, no. 1 (2017): 91–112.
- Fadli, Muhammad Rijal, dan Bobi Hidayat. *KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad (dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945)*. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2018.
- Hawari, Alhilal Yusril, Utang Suwaryo, dan Dede Sri Kartini. "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 1 (2023): 41–53.
- Iman, Miqdad Syukril. "ANALISIS PARTAI POLITIK ISLAM PRA HINGGA PASCA KEMERDEKAAN 1910-1960: SEBUAH KAJIAN ISLAM FORMALIS." *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2023): 49–65.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mu'thi, Abdul, Abdul Munir Mulkhan, Djoko Marihandono, dan Tim Museum Kebangkitan Nasional. *KH. Ahmad Dahlan (1868-1923)*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Rizkianto, Anggit. *Jalan Dakwah Sarekat Islam*. Bojonegoro: Zhena Ardh Grumma, 2020.
- Sukamto, Amos. "Ketegangan antar kelompok agama pada masa orde lama sampai awal orde baru: Dari konflik perumusan ideologi negara sampai konflik fisik." *Indonesian Journal of Theology* 1, no. 1 (2013): 25–47.
- Syukur, Abdul, Robby Aditya Putra, Saifullah Saifullah, dan Dede Mercy Rolando. "Haji Oemar Said Tjokroaminoto: Biografi, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 177–190.
- Utomo, Darmono Budi, dan Ahmadi Hasan. "Politik Hukum Islam Di Indonesia Era Pra Kemerdekaan Dan Era Orde Lama." *Jentera Hukum Borneo* 6, no. 2 (2023): 13–24.

Zaprulkhan. "Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia." *JRP (Jurnal Review Politik)* 3, no. 2 (2013): 153–167.